

Strategi Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM Koperasi Bona Mandiri Jaya

Manna Harahap¹, Riphon Delzy Perkasa²

^{1,2}Jurusan Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mannaharahap7@gmail.com¹

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises or abbreviated UMKM are businesses carried out by the community and refer to productive economic businesses owned by individuals or business entities in accordance with the criteria stipulated by Law no. 20 of 2008. Referring to North Sumatra BPS data, the economic census in 2016 revealed that the percentage of non-agricultural MSEs according to business status, 98.84 percent of micro-small businesses and 1.16 percent (Percentage of Non-agricultural MSEs by Business Status, 2016) are medium-sized businesses. big. The method used in this study is a qualitative approach based on descriptive analysis. Based on the analysis of the results of the discussion that in carrying out the empowerment carried out by the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises with Stephen P. Robbins' Strategy Theory indicators, the process is still quite good.

Keywords : *strategy, cooperative, umkm*

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. mengacu kepada data BPS Sumatera Utara mengungkapkan, sensus ekonomi pada tahun 2016 bahwa presentase UMK nonpertanian menurut status usaha, 98,84 persen usaha mikro kecil dan 1,16 persen (Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016) adalah usaha menengah besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif berbasis analisis deskriptif. Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik.

Kata kunci : *strategi, koperasi, umkm.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Karena masyarakat sebagai pelaku produktif oleh karena itu sangat penting perannya dalam perkembangan ekonomi nasional masyarakat karena dapat memperluas kesempatan kerja dan

memberikan pelayanan ekonomi secara merata kepada masyarakat, berpengaruh dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara.

Gambaran perekonomian yang sudah dijelaskan bukan dimaksudkan untuk menganalisa lebih dalam tentang keilmuan ekonomi secara murni akan tetapi penulis ingin lebih memperdalam bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM tersebut. Hal ini mengacu kepada data BPS Sumatera Utara mengungkapkan, sensus ekonomi pada tahun 2016 bahwa presentase UMK nonpertanian menurut status usaha, 98,84 persen usaha mikro kecil dan 1,16 persen (Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016) adalah usaha menengah besar.

Hasil analisis yang dikaji pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian Adil Makmur Sentosa (Sentosa, 2018) dengan artikel yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi. Hasil dari kajian artikel tersebut yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kota Bekasi telah melaksanakan strategi dalam pemberdayaan UMKM Kota Bekasi.

Kedua, penelitian Suci Astari (Astari, 2019) artikel berjudul Strategi Dinas Koperasi dan UKM KotaLangkat dalam Pengembangan Sektor UMKM. Hasil dalam kajian artikel ini adalah berbagai strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM KotaLangkat dalam mengembangkan UMKM merupakan strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Perbedaan kajian peneliti dengan artikel tersebut yaitu terletak pada objek kajian. Objek kajian peneliti yaitu pada Dinas Koperasi dan UKM KotaMedan . Peneliti menggunakan Teori Strategi dari Stephen P. Robbins dengan indikator dimensi: Inovasi, Diferensiasi Pasar, Jangkauan, Pengendalian Biaya (Cost Control).

Dengan demikian dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan UMKM di KotaMedan . Maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Koperasi Dalam Pemberdayaan Umkm Koperasi Bona Mandiri Jaya**” fokus kajian pada instansi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, studi kasus Bidang Perberdayaan Usaha Mikro. Dalam menganalisis penulis menggunakan Teori Strategi dari Stephen P. Robbins dengan indikator dimensi : Inovasi, Diferensiasi Pasar, Jangkauan, Pengendalian Biaya (Cost Control). Tujuan penulis dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang akan dilakukan oleh UMKM Koprasi Bona Mandiri Jaya dalam memperdayakan anggotanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif berbasis analisis deskriptif dengan ikut serta memberikan banyak penjelasan data yang diperoleh dai hasil observasi lalu disesuaikan dengan tujuan pemberian penjelasan data, lalu diperkuat dengan teori deskriptif yang ada. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu dengan studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Penulis memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Teknik analisis yang dipakai adalah model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data (reduksi data), display data (penyajian data), conclution drawing/verification (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara masyarakat dan koperasi adalah sangat penting hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rufaidah (2017) yaitu koperasi dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek, sehingga pola gerakan koperasi harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat. Oleh karena itu koperasi dapat dijadikan salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Secara konsepsional, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, yang dapat ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat (Soesastro, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut koperasi hadir dalam rangka memenuhi permodalan untuk usaha UMKM. Koperasi juga dapat berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika sebelumnya koperasi dibahas bahwa koperasi adalah wadah masyarakat dalam mengatasi permasalahan keuangan yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat menciptakan masyarakat yang berdaya dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapinya.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerinta daerah dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Agar menjadi penelitian yang tepat dan terpadu, maka peneliti menggunakan analissi internal dan eksternal untuk memperoleh data-data terbaik, antara lain meliputi :

Aspek Internal

Aspek Internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal koperasi didapatkan dengan wawancara para stakeholder koperasi. Data dan informasi diberikan oleh stakeholder koperasi dengan melihat :

- a. Kemampuan anggota koperasi yang mempunyai dana/modal sendiri cukup besar. Beberapa koperasi di Kotamempunyai latar belakang karyawan/profesi/pegawai yang memiliki kemampuan penghimpunan dana (modal sendiri) cukup baik. Sehingga hal ini bisa menunjang berjalannya kegiatan perkoperasian di Kota Medan .

- b. Hubungan stakeholders koperasi yang cukup baik. Hubungan antara pemerintah, Dekopinda, dan Koperasi serta lembaga keuangan lainnya terjalin cukup baik. Hal ini menjadikan keunggulan koperasi yang bisa dioptimalkan kerjasama baik antar koperasi maupun dengan stakeholders lainnya.
- c. Dukungan lembaga pendidikan/universitas dalam pengembangan koperasi. Dukungan diberikan oleh lembaga pendidikan/universitas melalui sosialisasi, pembelajaran perkoperasian di dalam mata pelajaran/mata kuliah, riset dan pengembangan terkait perkoperasian.
- d. Penerapan prinsip-prinsip koperasi yang tinggi. Penerapan prinsip-prinsip koperasi di Kota Medan sudah cukup tinggi dan terbukti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam koperasi-koperasi di Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
- e. Kaderisasi kurang berjalan baik Koperasi masih dianggap sebagai badan usaha yang kurang modern dan ketinggalan zaman untuk generasi muda, sehingga untuk kaderisasi atau pengganti pengurus di masa yang akan datang sangat jarang yang berminat untuk meneruskan khususnya bagi generasi milenial.
- f. Kualitas SDM koperasi masih rendah. Kualitas SDM koperasi saat ini masih dianggap rendah karena kurangnya seleksi dalam perekrutan SDM koperasi dan mayoritas pegawai koperasi adalah generasi tua yang kurang ahli khususnya dalam bidang teknologi.
- g. Manajemen usaha yang masih lemah. Koperasi masih menerapkan manajemen sederhana dan belum memiliki aturan untuk pelaporan keuangannya, sehingga dibutuhkan manajemen usaha yang berbasis kewirausahaan.
- h. Penguasaan teknologi masih rendah. Sebagian besar koperasi belum menerapkan teknologi canggih kegiatan perkoperasiannya dan masih menggunakan cara manual ataupun yang dianggap sederhana tanpa menggunakan teknologi.
- i. Penerapan kerjasama koperasi masih rendah. Kerjasama antar koperasi masih cukup sedikit dan kadang cenderung jalan ditempat atau tidak ada perkembangan atau tidak dilanjutkan.
- j. Penerapan pendidikan koperasi masih rendah. Pendidikan koperasi belum dilaksanakan secara berkala atau minimal setahun satu kali. Hal ini terkait dengan biaya pendidikan dan pelatihan koperasi yang tidak dianggarkan dari SHU.

Aspek Eksternal

Aspek Eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal koperasi didapatkan dengan wawancara para stakeholder koperasi. Data dan informasi diberikan

oleh stakeholder koperasi dengan melihat apa saja aspek yang menurut mereka mempengaruhi perkembangan koperasi. Berikut ini merupakan aspek-aspek eksternal :

- a. Pertumbuhan koperasi yang pesat Koperasi di KotaMedan tumbuh cukup pesat, hal ini dikarenakan dalam pendirian koperasi tidak sesulit mendirikan badan usaha lainnya.
- b. Kemampuan koperasi melakukan kemitraan Koperasi sudah menjalankan kemitraan dengan sesama koperasi ataupun badan usaha lain non-koperasi, hal ini menjadi keuntungan bagi koperasi yang bisa memperluas jaringan kerjasamanya.
- c. Pembinaan pemerintah yang dilakukan rutin, Pemerintah telah membina koperasi-koperasi yang ada di KotaMedan secara rutin serta menyeluruh. Pemerintah juga sudah mendata koperasi-koperasi yang ada berdasarkan keaktifan koperasi.
- d. Dorongan dan dukungan pemerintah, Pemerintah juga telah mendorong dan mendukung secara penuh kegiatan perkoperasian di KotaMedan melalui beberapa program serta penyuluhan guna membina koperasi-koperasi.
- e. Keuntungan dari perkembangan teknologi, Kemajuan teknologi membuat dunia semakin terbuka, demikian pula untuk koperasi sendiri. Kemampuan memperluas jaringan pemasaran dan jangkauan didapatkan dari kemajuan teknologi, sehingga ini menguntungkan bagi koperasi-koperasi.
- f. Persaingan usaha semakin ketat, Seiring berjalannya zaman, persaingan usaha pun semakin ketat dan banyak. Berbagai badan usaha telah lahir dan tumbuh berkembang serta menjadikan persaingan usaha semakin susah dan ketat sehingga dibutuhkan strategi untuk menghadapi hal tersebut.
- g. Perkembangan zaman memaksa koperasi untuk adaptasi, Semakin berkembangnya zaman, menuntut koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Koperasi harus lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman sehingga tidak tertinggal dengan halhal yang baru.
- h. Regulasi yang sering berubah-ubah, Peraturan terkait perkoperasian dari awal muncul sampai saat ini selalu berubah-ubah. Apalagi jika pemimpin sudah ganti, ternyata regulasinya juga berubah lagi sesuai dengan yang berkuasa saat itu.
- i. Larangan koperasi agar tidak menerima bantuan sosial atau hibah dari pemerintah Koperasi sebagai lembaga yang mandiri dilarang untuk menerima bantuan dalam bentuk apapun, sekalipun itu bantuan sosial atau hibah dari pemerintah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip koperasi.
- j. Minat masyarakat berkoperasi rendah, Masyarakat saat ini lebih percaya menginvestasikan hartanya ke lembaga keuangan perbankan dari pada ke

koperasi. Apalagi koperasi dianggap lembaga/badan usaha yang dianggap kurang modern dan ketinggalan zaman.

Sesuai dengan fakta di lapangan peneliti temukan program-program inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah menurut peneliti masih dibawah standar efektif dan efisien. Pengawasan yang kurang baik menyebabkan terjadinya penyelewengan dilapangan seperti contoh kasus yaitu usaha yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaan fisiknya. Dampak yang diberikan dari adanya program tersebut juga ditemukan kurangnya perhatian banyak pelaku UMKM untuk mengikuti standar yang disediakan oleh pemerintah dan keterbatasan dari pelaku UMKM sendiri. Banyak dari pelaku UMKM yang cenderung fokus hanya pada pengembangan usaha tanpa berharap kepada pemerintah dan mohon maaf harus pemeliti katakana bahwa apabila pemerintah tidak mengganggu dengan kebijakan yang mempersulit pelaku UMKM maka pelaku usaha sudah bisa lebih baik dalam mengembangkan usahanya.

Analisis perihal strategi diferensiasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Kenyataan dilapangan tentu tidak akan sama persis apa yang dijelaskan dari pihak pemerintah tentu diperlukan pendalaman dan pencarian fakta lapangan. Peneliti sangat tertarik mendalami perihal perizinan dimana terdapat perizinan seperti Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, Sertifikat Halal, Hak Kekayaan Intelektual dan Produk Industri Rumah Tangga. Dari analisis peneliti sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel dalam latar belakang jumlah pelaku usaha mikro kecil KotaMedan yang berjumlah 348.858 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) pelaku usaha mikro kecil, hanya 17755 saja yang terdaftar artinya sekitar 1,964 % saja pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha bahkan jauh untuk mencapai setengah dari keseluruhannya.

Uraian di atas merupakan analisis data dan belum mencangkup pelaku usaha secara langsung selanjutnya peneliti akan merangkum hasil wawancara dengan para pelaku usaha dilapangan. Dari wawancara peneliti dengan pelaku

UKM dimulai dari usaha yang memiliki omset Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) perbulan sampai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) perbulan narasumber yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam perihal HAKI atau untuk menonjolkan loyalitas merek, pelaku UKM kurang memperhatikan standardisasi tersebut. Dalam bidang kuliner saja banyak yang belum memperhatikan perizinan yang mengakibatkan cukup sulit memasuki ritel-ritel dan memasarkan produknya. Hal tersebut bisa dijadikan indikator bahwa banyaknya UMKM yang mengalami stagnasi adalah kurangnya perhatian pada hal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM pada saat ini proyeksi yang sedang dilaksanakan seperti pembuatan database UMKM, sistem informasi bangkit UKM atau membangun galeri-galeri di daerah belum sepenuhnya selesai atau masih dalam proses sehingga output kepada pelaku UKM belum bisa dirasakan mayoritas pelaku usaha UMKM (khususnya yang jauh pada pusat/kantor pemerintahan KotaMedan) lebih banyak yang tidak merasakan dampak inovasi tersebut karena kurangnya mengikuti arus informasi pemerintah dan cenderung hanya fokus pada usaha yang ia jalani ketimbang yang merasakan manfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins masih dalam proses cukup baik. Beberapa kesimpulan dari indikator Teori Strategi Stephen P. Robbins, yaitu :

1. Inovasi seperti pembuatan database UMKM dalam bentuk aplikasi adalah program yang sedang dilaksanakan dan belum dapat dirasakan oleh Pelaku UMKM dan Masyarakat sedangkan Mall dan Galeri UMKM belum dirasakan menyeluruh.
2. Diferensiasi pasar kuliner memerlukan standar kualitas agar mendapatkan perizinan serta dapat menjadi produk unggulan di KotaMedan.
3. Jangkauan walaupun terdapat cukup banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam marketplace akan tetapi masih banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang memiliki jangkauan yang kecil karena kurangnya penguasaan teknologi.
4. Pengendalian Biaya rata-rata permasalahan yang sering dijumpai adalah masalah modal dan hal tersebut erat hubungannya dengan koperasi dan perbankan masalah yang ditemui adalah beratnya dalam pembayaran bunga yang menghasilkan suatu kesimpulan pelaku UMKM menginginkan penyediaan modal yang tidak menggunakan sistem bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, S. (2019). Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika*, 22 (2), 361- 374
- Sentosa, A. M. (2018). STARTEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM KOTA BEKASI. *PARAMETER*, 3(2)
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil